

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Sistem Pengendalian Internal**

##### **2.1.1 Pengertian Sistem**

Suatu sistem sangatlah dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah, karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Dalam hal ini agar dapat berjalan dengan baik diperlukan kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut.

Istilah sistem sekarang ini banyak dipakai khalayak umum, banyak orang berbicara mengenai sistem perbankan, sistem akuntansi, sistem persediaan, sistem pemasaran, sistem pendidikan, sistem perangkat lunak, sistem tata surya, sistem teologi dan masih banyak lagi. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk suatu tujuan. Model dasar dari bentuk sistem ini adalah adanya masukan, pengolahan dan keluaran. Akan tetapi, sistem ini dapat dikembangkan hingga menyertakan media penyimpanan.

Menurut Mulyadi (2014:5), sistem adalah suatu jaringan yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal. Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penugasan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

### 2.1.2 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Slamet Sugiri (2012:1), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua cara, dan alat-alat terkoordinasi yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan aset perusahaan, meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta ketaatan pada hukum dan peraturan (Hery, 2011:87).

Sistem pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan, (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2011:82).

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2014:70), sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan dan karyawan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap entitas berangkat pada sebuah misi, sambil menetapkan yang ingin dicapai dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dapat ditetapkan sebagai suatu keseluruhan, atau ditujukan pada kegiatan-kegiatan spesifik dalam entitas. Tujuan yang umum bagi semua entitas mencapai dan memelihara manipulasi positif dalam bisnis dan komunitas konsumen, menyediakan laporan keuangan yang handal kepada stakeholder, dan beroperasi dengan mematuhi hukum dan regulasi. Tujuan-tujuan tersebut termasuk dalam tiga kategori :

1. Operasi; berhubungan dengan penggunaan sumber entitas secara efisien dan efektif.
2. Pelaporan keuangan; berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang diterbitkan secara handal.
3. Kepatuhan; berhubungan dengan kepatuhan entitas pada hukum dan regulasi (Murtanto,2015:24).

### **2.1.3 Unsur - unsur Pengendalian Internal**

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO) (2013:45), Pengendalian internal mempunyai lima komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di

seluruh organisasi.

Dalam *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO) (2013:56), terdapat lima prinsip yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian antara lain:

- a) Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:86), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- 1) Menetapkan pola atau gaya di tingkat puncak

Dewan direksi dan manajemen pada semua level entitas menunjukkan dengan arahan, tindakan, dan perilaku mereka mengenai pentingnya integritas dan nilai etika untuk mendukung fungsi sistem pengendalian internal.

- 2) Menetapkan standar perilaku

Ekspektasi dewan direksi dan manajer senior mengenai integritas dan nilai-nilai etika didefinisikan dalam standar entitas dengan menetapkan standar perilaku pada semua karyawan.

- 3) Mengevaluasi ketaatan untuk standar yang dilakukan

Proses untuk melakukan evaluasi kinerja individu dan tim dalam menerapkan standar yang telah ditetapkan.

- 4) Membicarakan penyimpangan pada waktu yang tepat

Penyimpangan dari standar yang diharapkan entitas diidentifikasi dan diperbaiki secara konsisten dan tepat waktu.

- b) Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:93), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

1) Menetapkan tanggung jawab pengawasan

Dewan direksi mengidentifikasi dan menerima tanggungjawab pengawasan dalam hubungan untuk menetapkan persyaratan dan ekspektasi.

2) Menggunakan keahlian yang relevan

Dewan direksi mendefinisikan, memelihara, dan secara periodik mengevaluasi keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan di antara anggota-anggotanya untuk memampukan mereka menanyakan pertanyaan pemeriksaan dari manajemen senior dan mengambil tindakan yang cocok.

3) Mengoperasikan secara independen

Dewan direksi mempunyai anggota yang cukup independen dari manajemen dan bertujuan dalam mengevaluasi dan membuat keputusan.

4) Menyediakan pengawasan untuk sistem pengendalian internal

Dewan direksi memberikan tanggungjawab pengawasan untuk desain manajemen, implementasi, dan melakukan pengendalian internal.

c) Manajemen menetapkan dengan badan pengawas, struktur, alur pelaporan, dan otoritas dan tanggungjawab yang tepat dalam pencapaian tujuan.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:102), terdapat tiga poin penting berhubungan dengan karakteristik prinsip ini, yaitu:

1) Mempertimbangkan seluruh struktur dalam entitas

Manajemen dan dewan direksi mempertimbangkan berbagai struktur yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan.

2) Menetapkan alur pelaporan

Manajemen mendesain dan mengevaluasi alur pelaporan untuk setiap struktur entitas untuk mampu melaksanakan otoritas dan tanggung jawab dan mengalirkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas.

3) Mendefinisikan, memberikan, dan membatasi otoritas dan tanggung jawab

Otoritas memberikan wewenang kepada seseorang untuk berperilaku seperti yang dibutuhkan, namun otoritas seseorang juga perlu untuk mendefinisikan batasan wewenangnya. Manajemen dan dewan direksi mendelegasikan wewenang, mendefinisikan tanggung jawab, dan menggunakan proses dan teknologi yang tepat untuk menempatkan tanggung jawab dan pemisahan tugas pada berbagai level dalam organisasi.

d) Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan memelihara orang-orang yang kompeten sejalan dengan tujuan.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:102), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

1) Menetapkan kebijakan dan praktek

Kebijakan dan praktek mencerminkan ekspektasi kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

- 2) Mengevaluasi kompetensi dan membicarakan kekurangan Dewan direksi dan manajemen mengevaluasi kompetensi untuk sumber daya manusia dalam organisasi maupun penyedia jasa dari luar (*outsourcing*) dalam relasi untuk menetapkan kebijakan, praktek, dan membicarakan kekurangan-kekurangan jika diperlukan.
- 3) Menarik, mengembangkan, dan memelihara individu-individu atau sumber daya manusia. Organisasi menyediakan konsultasi dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menarik, mengembangkan dan memelihara personel ataupun penyedia jasa dari luar yang cukup dan kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan.
- 4) Perencanaan dan persiapan untuk penggantian  
Manajemen senior dan dewan direksi mengembangkan kemungkinan rencana untuk tugas dari tanggung jawab yang penting dalam pengendalian internal.
- e) Organisasi memiliki orang-orang yang bertanggungjawab untuk pengendalian internal mereka sejalan dengan tujuan. Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:102), terdapat lima poin penting berhubungan dengan karakteristik prinsip ini, yaitu:
  - 1) Menjalankan akuntabilitas melalui struktur, otoritas dan tanggung jawab  
Akuntabilitas mengarah pada kepemilikan wewenang untuk kinerja pengendalian internal dalam pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang dihadapi oleh entitas. Manajemen dan dewan direksi

menetapkan mekanisme untuk mengkomunikasikan dan memiliki individu yang bertanggungjawab untuk kinerja tanggung jawab pengendalian internal seluruh organisasi dan mengimplementasikan tindakan perbaikan jika dibutuhkan.

- 2) Menetapkan pengukuran kinerja, insentif, dan penghargaan Manajemen dan dewan direksi menetapkan pengukuran kinerja, insentif, dan penghargaan lain yang tepat untuk tanggung jawab semua level pada entitas, mencerminkan dimensi yang tepat dari kinerja dan mengharapakan standar dilaksanakan, dan mempertimbangkan pencapaian tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.
- 3) Mengevaluasi pengukuran kinerja, insentif, dan penghargaan secara relevan dan terus-menerus. Manajemen dan dewan direksi menyepakati insentif dan penghargaan dengan penyelesaian tanggung jawab pengendalian internal dalam mencapai tujuan.
- 4) Mempertimbangkan tekanan yang terlalu banyak. Manajemen dan dewan direksi mengevaluasi dan menyesuaikan tekanan yang diasosiasikan pencapaian tujuan dengan mereka memberikan tanggung jawab, mengembangkan pengukuran kinerja, dan mengevaluasi kinerja.
- 5) Mengevaluasi kinerja dan penghargaan atau kedisiplinan individu. Manajemen dan dewan direksi mengevaluasi kinerja tanggung jawab dan mengharapakan level-level kompetensi dan menyediakan penghargaan atau pelatihan tindakan disiplin yang tepat.



## 2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Setiap entitas menghadapi berbagai resiko dari sumber eksternal maupun internal. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Penilaian resiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai resiko terhadap pencapaian tujuan.

Menurut *Commitee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO) (2013:57), terdapat empat prinsip berkaitan dengan penaksiran resiko, yaitu:

- a) Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk mampu mengidentifikasikan dan menaksir resiko yang terkait dengan tujuan. Dalam prinsip ini, tujuan-tujuan berkaitan dengan tujuan operasi, tujuan pelaporan (baik internal maupun eksternal), dan tujuan kepatuhan.
  - 1) Hal-hal yang berhubungan dengan tujuan operasi yaitu: mencerminkan pilihan manajemen, mempertimbangkan batas toleransi yang dapat diterima untuk resiko, memasukkan tujuan kinerja operasi dan keuangan, dan membentuk suatu dasar untuk menjalankan sumber daya.
  - 2) Hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan kepada pihak eksternal antara lain: patuh dengan standar akuntansi yang dapat diterapkan, mempertimbangkan materialitas, dan mencerminkan aktivitas entitas.
  - 3) Poin-poin yang berkaitan dengan tujuan pelaporan internal antara lain:

mencerminkan pilihan manajemen, mempertimbangkan level ketelitian yang dibutuhkan, dan mencerminkan aktivitas entitas.

4) Poin-poin yang berkaitan dengan tujuan kepatuhan antara lain: mencerminkan hukum dan regulasi eksternal dan mempertimbangkan toleransi yang dapat diterima atas resiko.

b) Organisasi mengidentifikasi resiko untuk mencapai tujuan semua entitas dan menganalisis resiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana resiko seharusnya dikelola. Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:139), terdapat lima poin penting berhubungan dengan karakteristik prinsip ini, yaitu:

- 1) Memasukkan level entitas, cabang, divisi, unit operasi, dan fungsional. Organisasi mengidentifikasi dan menilai resiko pada level entitas, cabang, divisi, unit operasi, dan fungsional yang relevan dengan pencapaian tujuan. Identifikasi resiko merupakan proses yang berulang dan biasanya diintegrasikan dengan proses perencanaan.
- 2) Menganalisis faktor internal dan eksternal.

Identifikasi resiko mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dan pengaruhnya dalam pencapaian tujuan. Faktor eksternal, terdiri dari: ekonomi, lingkungan alam, regulasi, sosial, teknologi, dan operasi di negara asing (*foreign operation*). Sedangkan faktor internal, terdiri dari: infrastruktur, struktur manajemen, personel, akses atas aset, dan teknologi

- 3) Melibatkan level manajemen yang tepat.

Organisasi memasukkan mekanisme penaksiran resiko yang efektif dengan melibatkan level manajemen yang tepat.

- 4) Mengestimasi tingkat signifikan resiko yang teridentifikasi.

Resiko yang diidentifikasi dianalisis melalui suatu proses termasuk mengestimasi resiko signifikan yang potensial.

- 5) Menentukan bagaimana respon terhadap resiko.

- 6) Penaksiran resiko termasuk mempertimbangkan bagaimana resiko sebaiknya diatur entah itu diterima, dihindari, dikurangi, maupun dibagi.

- c) Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam penaksiran resiko untuk mencapai tujuan. Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:151), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- 1) Mempertimbangkan berbagai jenis kecurangan (*fraud*).

Penaksiran kecurangan mempertimbangkan pelaporan yang curang, Kemungkinan kehilangan aset, dan korupsi yang dihasilkan dari berbagai cara bahwa kecurangan dan kejahatan bisa terjadi.

- 2) Menaksir dorongan dan tekanan.

Dorongan dan tekanan biasanya dihasilkan dari lingkungan pengendalian. Hal ini dapat merupakan pengaruh yang potensial untuk resiko kecurangan.

3) Menaksir kesempatan.

Kesempatan mengacu pada kemampuan untuk sebenarnya memperoleh, menggunakan, atau membuang aset yang mungkin disertai dengan perubahan pencatatan entitas. Kesempatan diciptakan oleh aktivitas pengendalian dan pengawasan yang lemah, pengawasan manajemen yang buruk, dan penolakan kontrol manajemen.

4) Menaksir perilaku dan rasionalisasi.

Penaksiran resiko kecurangan mempertimbangkan bagaimana manajemen dan personel lainnya mungkin terlibat dalam dan membenarkan tindakan yang salah.

d) Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang bisa berpengaruh pada sistem pengendalian internal secara signifikan. Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:159), terdapat tiga poin penting berhubungan dengan prinsip ini, antara lain:

1) Menaksir perubahan dalam lingkungan eksternal.

Proses identifikasi resiko mempertimbangkan perubahan regulasi, ekonomi, dan lingkungan fisik di mana entitas beroperasi.

2) Menaksir perubahan dalam model bisnis.

Organisasi mempertimbangkan pengaruh potensial dari jenis bisnis baru, secara dramatis mengubah komposisi dari jenis bisnis yang telah ada, memperoleh atau melepaskan operasi bisnis pada sistem pengendalian internal, pertumbuhan yang cepat, perubahan dalam geografi asing, dan teknologi baru.

3) Menaksir perubahan dalam kepemimpinan.

Organisasi mempertimbangkan perubahan dalam manajemen dan tindakan masing-masing dan filosofi dalam sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian (*Control Activities*) adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*) dilakukan di semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan pada lingkup teknologi.

Menurut *Commitee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)* (2013: 57-58), terdapat tiga prinsip yang berhubungan dengan aktivitas pengendalian, antara lain:

- a) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi dalam pencegahan resiko untuk mencapai tujuan pada level yang dapat diterima.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:166), terdapat enam poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- 1) Mengintegrasikan dengan penaksiran resiko.

Aktivitas pengendalian membantu menjamin bahwa respon resiko yang menyebut dan mengurangi resiko dilakukan.

2) Mempertimbangkan faktor spesifik entitas.

Manajemen mempertimbangkan bagaimana lingkungan, kompleksitas, alam, dan bidang operasi, maupun karakteristik organisasi yang spesifik mempengaruhi pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian.

3) Menetapkan proses bisnis yang relevan.

Manajemen menetapkan proses bisnis yang relevan yang memerlukan aktivitas pengendalian.

4) Mengevaluasi campuran tipe pengendalian internal.

Aktivitas pengendalian termasuk susunan dan berbagai pengendalian dan mungkin termasuk suatu kesinambungan untuk mengurangi resiko, mempertimbangkan kontrol secara manual ataupun otomatisasi, dan kontrol pencegahan dan detektif.

5) Mempertimbangkan pada level apa aktivitas pengendalian pada berbagai level dalam entitas.

Manajemen mempertimbangkan aktivitas pengendalian pada berbagai level dalam entitas.

6) Adanya pemisahan tugas.

Manajemen melakukan pemisahan tugas antara tugas-tugas yang berpotensi untuk terjadinya kecurangan. Tugas-tugas yang biasanya dipisahkan adalah fungsi otorisasi, fungsi pemegang harta, dan fungsi pencatat.

b) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang umum melalui teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan. Menurut COSO dalam *Internal Control-Integrated Framework* (2013:178), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- 1) Menentukan ketergantungan antara kegunaan teknologi dalam proses teknis dan teknologi dalam pengendalian umum. Manajemen memahami, menetapkan ketergantungan dan hubungan antara proses bisnis, aktivitas pengendalian yang otomatis, dan pengendalian teknologi secara umum.
- 2) Menetapkan infrastruktur teknologi aktivitas pengendalian yang relevan. Manajemen memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian melalui infrastruktur teknologi yang didesain dan diimplementasikan untuk membantu menjamin kelengkapan, akurasi dan ketersediaan dari proses teknologi.
- 3) Menetapkan aktivitas pengendalian dalam proses keamanan manajemen yang relevan. Manajemen memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang didesain dan diimplementasikan untuk membatasi hak akses atas teknologi untuk mengotorisasi pengguna yang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan mereka dan untuk melindungi aset entitas dari ancaman eksternal.
- 4) Menetapkan proses akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan

aktivitas pengendalian yang relevan. Manajemen memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian melalui akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi dan infrastruktur untuk mencapai tujuan manajemen.

c) Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang memasukkan kebijakan dalam tindakan. Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:184-185), terdapat enam poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- 1) Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mendukung penyebaran arahan manajemen. Manajemen menetapkan aktivitas pengendalian yang dibangun menjadi proses bisnis dan aktivitas karyawan sehari-hari melalui penetapan kebijakan yang diharapkan dan tindakan sesuai dengan prosedur yang relevan.
- 2) Menetapkan tanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Manajemen menetapkan tanggung jawab untuk aktivitas pengendalian dengan manajemen unit bisnis atau fungsi yang memiliki resiko yang relevan.
- 3) Melaksanakan dalam cara yang tepat waktu.

Tanggung jawab personel melaksanakan aktivitas pengendalian dalam cara yang tepat waktu didefinisikan dengan kebijakan dan prosedur.



4) Mengambil tindakan perbaikan.

Tanggung jawab personel menginvestigasi dan bertindak dalam persoalan yang diidentifikasi sebagai hasil pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5) Pelaksanaan menggunakan personel yang kompeten.

Personel yang kompeten dengan otoritas yang cukup melaksanakan aktivitas pengendalian dengan rajin dan fokus terus-menerus.

6) Menaksir kembali kebijakan dan prosedur.

Manajemen secara periodik mereview aktivitas pengendalian untuk menetapkan keberlangsungan yang relevan dan memperbaruinya ketika dibutuhkan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*)

Informasi dibutuhkan untuk melakukan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan. Manajemen menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas dari sumber eksternal dan internal untuk mendukung fungsi dari pengendalian internal. Komunikasi merupakan proses yang berulang untuk menyediakan, membagi, dan menghasilkan kebutuhan informasi. Komunikasi internal adalah informasi yang disebarkan dalam seluruh organisasi. Sedangkan komunikasi eksternal ada dua macam, yaitu memungkinkan datangnya komunikasi dari informasi eksternal yang relevan dan menyediakan informasi untuk pihak.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO) (2013:58), ada tiga prinsip yang berkaitan dengan

informasi dan komunikasi, yaitu:

a) Organisasi menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan, berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Menurut COSO (2013:193), terdapat lima poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

1) Mengidentifikasi keperluan informasi.

Suatu proses untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan diharapkan untuk mendukung fungsi komponen lain dari pengendalian internal dan mencapai tujuan entitas.

2) Mendapatkan sumber data internal dan eksternal.

Sistem informasi mengungkap sumber data internal dan eksternal.

3) Memproses data yang relevan menjadi informasi.

Sistem informasi memproses dan mentransformasikan data yang relevan menjadi informasi.

4) Memelihara kualitas melalui pemrosesan.

Sistem informasi memproduksi informasi yang tepat waktu, sekarang, akurat, lengkap, dapat diakses, dilindungi, dan dapat diverifikasi dan dipelihara. Informasi direview untuk relevansinya dalam mendukung komponen pengendalian internal.

5) Mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Sifat, jumlah, dan ketelitian dalam mengkomunikasikan informasi disertakan dan mendukung pencapaian tujuan.

b) Organisasi secara internal mengomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:201), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

1) Mengomunikasikan informasi pengendalian internal.

Suatu proses untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan untuk memampukan seluruh personil memahami dan melakukan tanggung jawab pengendalian internal mereka.

2) Mengomunikasikan dengan dewan direksi.

Komunikasi ada di antara manajemen dan dewan direksi sehingga keduanya memiliki informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi peran mereka dengan menghormati tujuan entitas.

3) Menyediakan pemisahan alur komunikasi.

Pemisahan saluran komunikasi, seperti saluran whistle-blower berada di tempat yang berfungsi sebagai mekanisme gagal dan simpan untuk memungkinkan komunikasi anonim sebagai rahasia ketika saluran normal berfungsi dengan tidak normal dan tidak efektif.

4) Memilih metode komunikasi yang relevan.

Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, pendengar, dan sifat dari informasi tersebut.

c) Organisasi mengkomunikasikan dengan pihak eksternal

mengenai persoalan yang mempengaruhi fungsi dari pengendalian internal. Menurut COSO dalam Integrated Framework (2013:208), terdapat lima poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

1) Mengkomunikasikan dengan pihak eksternal.

Suatu proses untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pihak eksternal termasuk shareholders, rekan, pemilik, pembuat regulasi, konsumen, dan analisis keuangan dan pihak eksternal lainnya.

2) Memungkinkan datangnya komunikasi.

Saluran komunikasi terbuka mengizinkan masukan (input) dari pelanggan, pemasok, auditor eksternal, pembuat regulasi, analisis keuangan, dan lainnya memberikan informasi yang relevan kepada manajemen dan dewan direksi.

3) Mengkomunikasikan dengan dewan direksi.

Informasi yang relevan yang dihasilkan dari penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal dikomunikasikan ke dewan direksi.

4) Menyediakan jalur pemisahan komunikasi.

Saluran komunikasi terpisah, seperti hotline whistle blower, tersedia dan berfungsi sebagai mekanisme yang tidak aman untuk memungkinkan komunikasi anonim atau rahasia bila saluran normal tidak berfungsi atau tidak efektif.

5) Memilih metode komunikasi yang relevan.

Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, pendengar, dan sifat komunikasi dan hukum, peraturan, dan persyaratan pengadaan.

5. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*) adalah evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, ada dan berfungsi. Evaluasi berkelanjutan, dibangun dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas, memberikan informasi yang tepat waktu sedangkan evaluasi terpisah, dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian resiko, efektivitas evaluasi yang berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan akan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh regulator, kriteria yang diakui badan penetapan standar atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan dikomunikasikan kepada manajemen dewan direksi yang sesuai.

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) (2013:59), ada dua prinsip yang berkaitan dengan aktivitas pengawasan, yaitu:

- a) Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Menurut COSO dalam

*Internal Control-Integrated Framework* (2013:217- 218), terdapat tujuh poin penting yang berkaitan dengan prinsip ini, antara lain:

- 1) Mempertimbangkan gabungan evaluasi yang sedang berlangsung dan terpisah.

Manajemen melakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah secara seimbang.

- 2) Mempertimbangkan tingkat perubahan.

Manajemen mempertimbangkan tingkat perubahan dalam proses bisnis dan bisnis dalam melakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

- 3) Menetapkan dasar pemahaman.

Perancangan dan keadaan sistem pengendalian internal saat ini digunakan untuk menetapkan garis dasar untuk evaluasi berkelanjutan dan terpisah.

- 4) Menggunakan personil yang memiliki pengetahuan.

Evaluasi yang melakukan evaluasi berkelanjutan dan terpisah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami apa yang sedang dinilai.

- 5) Terintegrasi dengan proses bisnis.

Evaluasi yang sedang berlangsung dibangun ke dalam proses bisnis dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi.

- 6) Menyesuaikan ruang lingkup dan frekuensi.

Manajemen bervariasi cakupan dan frekuensi evaluasi terpisah

tergantung pada resiko.

7) Mengevaluasi secara obyektif.

Evaluasi terpisah dilakukan secara berkala untuk memberikan umpan balik yang obyektif.

b) Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal pada waktu yang tepat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan, termasuk manajemen senior dan dewan direksi secara tepat. Menurut COSO dalam *Internal Control-Integrated Framework* (2013:226), terdapat tiga poin penting yang berkaitan dengan prinsip ini, antara lain:

1) Menilai hasil

Manajemen dan dewan direksi menilai hasil evaluasi yang berkelanjutan dan terpisah.

2) Mengkomunikasikan kekurangan

Kekurangan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan.

3) Mengawasi tindakan perbaikan

Manajemen mencari kekurangan dan melakukan tindakan perbaikan secara tepat waktu.

#### **2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Internal**

Setiap pengendalian internal perusahaan memiliki keterbatasan, oleh karena itu suatu sistem tidak ada yang dapat mencegah secara sempurna semua penyelewengan yang ada didalam perusahaan. Keterbatasan sistem pengendalian

intern menurut Mulyadi (2014:181) adalah:

1. Kesalahan dalam pertimbangan.

Manajemen dan personel lain sering kali salah paham dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan tugas rutin karena keterbatasan waktu, tidak memadainya informasi, atau tekanan lain.

2. Gangguan-gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.

3. Kolusi

Kolusi merupakan tindakan bersama dalam individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang.

4. Manajemen yang mengabaikan pengendalian internal.

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajer melaporkan jumlah laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapat bonus lebih tinggi.

5. Biaya lawan manfaat.

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur



pengendalian internal.

### **2.1.5 Prinsip – prinsip Pengendalian Internal**

Untuk mengamankan aset dan meningkatkan keakuratan catatan (informasi) akuntansi, organisasi perusahaan biasanya menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal. Lima prinsip pengendalian internal menurut Jusup (2011:6-12) sebagai berikut :

1. Penetapan tanggung jawab. Prinsip yang paling utama dalam pengendalian internal adalah penetapan tanggung jawab ke masing-masing karyawan secara spesifik. Hal ini meliputi pemberian otorisasi untuk menyetujui suatu transaksi.
2. Pemisahan tugas. Pada umumnya ada dua bentuk pemisahan tugas yaitu :
  - a) Pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula.
  - b) Adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aset dengan karyawan yang menangani langsung aset secara fisik (operasional).
3. Prosedur dokumentasi  
Perusahaan harus membangun prosedur untuk mendokumentasi setiap transaksi. Perusahaan seharusnya menomorkan setiap dokumen transaksi sehingga dapat dihindari pencatatan dua kali transaksi.
4. Pengendalian secara fisik  
Pengendalian secara fisik berhubungan dengan penjagaan aset dan memastikan ketepatan dan reliabilitas catatan akuntansi. Beberapa

pengendalian secara fisik seperti safety deposit box untuk penempatan kas, fasilitas komputer dengan password, pemantauan dengan CCTV, penggunaan alarm, *time clock* untuk mencatat waktu kerja.

#### 5. Verifikasi Internal yang Independen

Prinsip ini melibatkan pemeriksaan data yang diperiksa oleh karyawan. Pemeriksaan catatan secara berkala atau secara mendadak seharusnya dilakukan oleh perusahaan.



## 2.2. Sistem Informasi Akuntansi

### 2.2.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Ada beberapa pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut (*Susanto, 2013*) adalah : “Sistem Informasi Akuntansi dapat di definisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan”. Berdasarkan teori – teori yang diuraikan diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto.
2. Menurut (*Hall, 2016*) yang telah dialih bahasakan oleh *Thomas Learning* menyatakan bahwa ; “Sistem Informasi Akuntansi terdiri atas catatancatatan dan metode yang digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis dan mencatat transaksi organisasi untuk memperhitungkan aktiva dan kewajiban terkait.”
3. Menurut (*Krismiaji, 2015*) menyatakan bahwa ; “Sistem Informasi Akuntansi sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.”

4. Kutipan diatas menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari sumber-sumber seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya kepada para pembuat keputusan. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya kedalam sistem.
- b) Memproses data transaksi
- c) Menyimpan data untuk keperluan dimasa mendatang.
- d) Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan ataumemungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer.
- e) Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.

### 2.2.2. Manfaat dan Tujuan Sistem Akuntansi

**Tabel 2.1 Tujuan Sistem**

Kemanfaatan	Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus membantu manajemen dan para pemakai dalam pembuatan keputusan.
Ekonomis	Manfaat sistem melebihi pengorbanannya.
Daya Handal	Sistem harus melebihi pengorbanannya.
Ketersediaan	Para pemakai harus dapat mengakses data senyaman mungkin, kapan saja pemakai menginginkannya.
Ketepatan Waktu	Informasi penting harus dihasilkan lebih dahulu, kemudian baru informasi lainnya.
Servis Pelanggan	Servis yang memuaskan kepada pelanggan harus diberikan.
Kapasitas	Kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan padaperiodesibuk dan pertumbuhan dimasa mendatang.
Praktis	Sistem harus mudah digunakan.
Fleksibilitas	Sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan sistem.
Daya Telusur	Sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai dan perancang, dan memudahkan penyelesaian persoalan serta pengembangan sistem dimasa mendatang.
Daya Audit	Daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal pembuatannya.
Keamanan	Hanya personil yang berhak saja yang berhak mengakses atau diijinkan mengubah data sistem.

Sumber: (Krismiaji, 2015)

Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan sistem informasi akuntansi adalah :

1. Mendukung operasi sehari-hari.
2. Mendukung pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan intern.

3. Memenuhi kewajiban dan berkenan dengan pengamanan.

Menurut (Hall, 2016), ada tiga tujuan utama yang umum bagi semua sistem termasuk sistem informasi akuntansi, yaitu :

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (*stewardship*) manajemen.

Kepengurusan merujuk ke tanggungjawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara internal pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggungjawaban.

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan.

Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan.

3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari.

Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif.

Sedangkan menurut (Daranatha, 2009) tujuan umum penyusunan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki informasi yang diberikan oleh sistem dalam kualitas, ketepatan waktu, atau dari struktur informasi tersebut.
2. Untuk memperbaiki pengendalian informasi dan pengecekan intern, yang berarti memperbaiki daya andal informs akuntansi dan

menyediakan catatan yang lengkap sebagai pertanggungjawaban dalam melindungi harta perusahaan.

3. Untuk menurunkan biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Dari ketiga tersebut harus mempertimbangkan pada waktu penyusunan suatu sistem informasi akuntansi, sehingga dapat diharapkan tidak ada salah satu tujuan yang terlewatkan.

### **2.2.3. Definisi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan**

Definisi sistem informasi akuntansi penjualan menurut *La Midjan dan (Susanto, 2013)* menyatakan sebagai berikut : “Sistem informasi akuntansi penjualan adalah kerangka kerja dalam sumber daya manusia, alat, metode dan kesemuanya itu di koordinasikan untuk mengolah data penjualan menjadi informasi penjualan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya”. Sedangkan pengertian sistem informasi akuntansi penjualan menurut *(Mulyadi, 2010)* menyatakan sebagai berikut ; “Sistem informasi akuntansi penjualan adalah penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli, setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan kemudian dicatat oleh perusahaan”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan mengkoordinasikan seluruh sub sistem dan komponen-komponen sistem di dalamnya untuk mengolah data penjualan mulai dari transaksi hingga pelaporan menjadi suatu informasi penjualan yang akan digunakan oleh penggunanya sebagai dasar pengambilan keputusan.

### 2.3. Pengujian Pengendalian

Penilaian resiko pengendalian mengharuskan auditor mempertimbangkan perancangan dan pelaksanaan pengendalian untuk mengevaluasi apakah pengendalian telah efektif dalam memenuhi tujuan audit. Selama tahap pemahaman, auditor diharuskan untuk mengumpulkan bahan bukti untuk mendukung perancangan pengendalian dan implementasinya dengan menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal klien. Namun biasanya, auditor belum mengumpulkan bukti yang cukup untuk memperkecil resiko pengendalian, sehingga auditor perlu mendapatkan bukti tambahan tentang efektivitas pelaksanaan pengendalian. Auditor biasanya menggunakan empat jenis prosedur untuk mendukung pengujian atas keefektifan pelaksanaan pengendalian internal. Keempat jenis prosedur tersebut adalah:

1. Mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat.
2. Memeriksa dokumen, catatan, dan laporan.
3. Mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian.
4. Melaksanakan kembali prosedur klien dengan cara menelusurinya.

### 2.4. Mengukur Efektivitas Pengendalian Internal

Menurut *Mulyadi (2002: 198)* ada tiga model *attribute sampling* yang digunakan untuk mengukur kepatuhan terhadap pengendalian internal:

1. *Fixed-sample-size attribute sampling*
2. *Stop-or-go sampling*
3. *Discovery sampling*



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model *attribute sampling* model *stop-or-sampling*. Berikut ini dicantumkan penjelasan model tersebut:

1. *Fixed-sample-size attribute sampling*

Model pengambilan sampel ini adalah model yang paling banyak digunakan dalam audit. Pengambilan sampel dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan presentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian internal, dan auditor tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan.

2. *Stop-or-go sampling*

Jika auditor menggunakan fixed sample size attribute sampling, kemungkinan auditor akan terlalu banyak mengambil sampel. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan model attribute sampling yang lain yaitu stop or go sampling. Model ini digunakan auditor jika kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil. Dalam stop or go sampling ini, jika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, maka dapat menghentikan sampelnya. Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan stop or go sampling adalah sebagai berikut:

- a) Tentukan desired upper precision limit (DUPL) dan tingkat keandalan (R).

Auditor disarankan untuk memilih tingkat keandalan 90%, 95%, 97,5%.

- b) Menggunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian

pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil.

- c) Buatlah tabel stop or go decision.
- d) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel.

Jika AUPL (Acceptable Upper Precision Limit) = DUPL (Desire Upper Precision Limit), maka pengendalian intern dikatakan efektif, jika pengambilan sampel sampai dengan empat kali dan hasilnya  $AUPL > DUPL$  maka pengendalian internal dikatakan tidak efektif. Dalam 22 menggunakan model fixed sample size attribute sampling sebagai alternatif untuk melanjutkan pemeriksaan.

### 3. *Discovery sampling*

Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol). Discovery sampling dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan. Prosedur pengambilan sampel dalam discovery sampling adalah sebagai berikut:

- a) Tentukan attribute yang akan diperiksa.
- b) Tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya.
- c) Tentukan tingkat keandalan.
- d) Tentukan desired upper precision limit.
- e) Tentukan besarnya sampel.
- f) Periksa attribute sampel.
- g) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sample.

## 2.5. Klasifikasi Asersi

Menurut ISA 315, kelompok asersi yang dapat digunakan auditor untuk Mempertimbangkan salah saji dalam laporan keuangan. Kelompok asersi untuk jenis- jenis transaksi (*classes of transaction*) dan peristiwa (*events*) untuk periode yang diaudit sebagai berikut:

1. Asersi tentang jenis transaksi untuk periode yang diaudit:
  - a) *Occurance* : Transaksi dan peristiwa yang telah dicatat, memang terjadi dan merupakan transaksi dari peristiwa dari entitas yang bersangkutan.
  - b) *Completeness* : Seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat.
  - c) *Accuracy* : Angka-angka, jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dicatat dengan akurat.
  - d) *Cut – off* : Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat.
  - e) *Classification* : Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang tepat.
2. Asersi tentang saldo akun pada akhir periode yang diaudit:
  - a) *Existence* : Adanya aset, liabilitas, dan ekuitas.
  - b) *Right and obligation* : Entitas memiliki atau menguasai aset dan memiliki kewajiban atas liabilitaas.
  - c) *Completeness* : Seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat.
  - d) *Valuation and allocation* : Aset, liabilitas, dan ekuitas tercantum dalam

laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyesuaian. Penilaian atau pengalokasian yang terjadi telah dicatat dengan benar.

3. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan:
  - a) *Occurance and rights and obligations* : Peristiwa, transaksi, dan hal-hal lainnya yang diungkapkan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.
  - b) *Completeness* : Seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan dalam laporan keuangan.
  - c) *Clasiffication and understandability* : Informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan dengan jelas.
  - d) *Accuracy and valuation* : Informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan dalam jumlah yang tepat.